

**ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR DAERAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011**



PUBLIKASI ILMIAH

Disusun Oleh:

FREDY ADI SAPUTRO

B 300 050 028

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca publikasi ilmiah dengan judul :

ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

Yang ditulis oleh :

FREDY ADI SAPUTRO

B 300 050 028

Penandatanganan berpendapat bahwa Penelitian tersebut telah memenuhi syarat
untuk diterima.

Surakarta, April 2015

Pembimbing



Siti Fatimah Nurhayati S.E., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Triyono, M.Si

ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

FREDY ADI SUPUTRO
B300 050 028

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak: Penelitian ini berjudul “*Analisis Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011*”. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengukur dan menganalisis distribusi pendapatan pada tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Mengukur dan menganalisis distribusi pendapatan antar daerah di provinsi jawa tengah tahun 2011.

Penelitian ini mengguakan data sekunder meliputi PDRB, jumlah penduduk, PDRB perkapita dan data-data lain yang terkait, dikumpulkan melalui studi pustaka yang dilakukan di kantor BPS Provinsi Jawa Tengah dan dinas-dinas pemerintah lainnya yang terkait. Metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis distribusi pendapatan di provinsi Jawa Tengah menggunakan alat analisis Koefisien Gini, sedangkan untuk menganalisis distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah menggunakan indeks Williamson.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah beradapada level rendah atau distribusi pendapatan agak merata, Sedangkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah relatif mendekati merata.

Kata kunci: Distribusi Pendapatan, Ketimpangan, Koefisien Gini, Indeks Williamson

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan

teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Dengan diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka telah terjadi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang sebelumnya menganut sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik. Tentu saja, keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah sekarang ini dan di masa akan datang ditentukan dari peran aktif dan inovatif dari pemerintah daerah itu sendiri.

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (*trickle down*) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru.

Perencanaan pembangunan ekonomi pada umumnya berorientasi pada masalah pertumbuhan (*growth*). Hal ini bisa dimengerti mengingat penghalang utama bagi pembangunan negara sedang berkembang adalah kekurangan modal. Jika kekurangan modal ini bisa teratasi, maka proses

pembangunan di negara-negara sedang berkembang akan lebih cepat mencapai sasaran, pembangunan nasional juga sangat tertopang dengan pembangunan daerah.

Angka kemiskinan di Jawa Tengah masih sangat tinggi. Data BPS bulan September tahun 2012 menunjukkan angka 4,863 juta orang (14,98 persen) berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan (16,55 persen) , tetapi ada pula kemiskinan di perkotaan (13,11 persen). Adapun pendapatan perkapita penduduk miskin Jawa Tengah pada angka Rp. 233.769,- per kapita per bulan dengan rincian Rp. 245.817,- per kapita per bulan untuk daerah perkotaan, dan Rp. 223.622,- per kapita per bulan untuk daerah pedesaan. Sistem distribusi pendapatan menentukan bagaimana pendapatan wilayah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan bernegara, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak proporsional hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja, sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam menyikapi tingginya angka kemiskinan hingga saat ini. Untuk itulah peneliti tertarik menganalisis masalah distribusi pendapatan antar daerah di provinsi Jawa Tengah dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011**”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah;

- a. Mengukur dan menganalisis distribusi pendapatan pada tingkat wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011
- b. Mengukur dan menganalisis distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011

3. Kajian Pustaka

Menurut Arsyad (1999:108), Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Menurut Rustiadi, dkk. (2011:119), Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai "upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik" dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia.

Menurut Sjafrizal (2012:107), Ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah.

Rustiadi, dkk. (2011:183), Aspek pemerataan sebagai salah satu tolok ukur pembangunan. Dalam membuat gambaran pemerataan pendapatan yang menggambarkan struktur ketimpangan vertikal di suatu wilayah. Lorenz membuat suatu kurva yang sekarang dikenal sebagai Kurva Lorenz. Kurva Lorenz yang makin melengkung ke kanan bawah atau dari garis kesetimbangan ideal menunjukkan semakin tidak meratanya pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Secara kuantitatif tingkat distribusi pendapatan digambarkan dengan membagi luas bidang yang diarsir dibagi setengah luas bidang bujur sangkar. Nilai perbandingan ini dikenal sebagai Nilai Ratio Gini (Indeks Gini) sesuai dengan nama orang yang memperkenalkannya. Dengan demikian semakin kecil yaitu mendekati nol angka indeks gini berarti semakin baik distribusi pendapatan masyarakat.

4. Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisis Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011" ini yang menjadi objek

penelitiannya adalah distribusi pendapatan pada tingkat wilayah Jawa Tengah dan distribusi pendapatan antar daerah di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011.

b. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram (Sugiarto, 2006). Data sekunder diperoleh dari kantor Biro Pusat Statistik dan dinas-dinas pemerintah lain yang terkait di provinsi Jawa Tengah. Data tersebut meliputi produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, PDRB perkapita dan data lain-lain yang terkait dengan distribusi pendapatan di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 (*cross section*).

c. Metode Pengumpulan Data

Data produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, PDRB Perkapita yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusinya di provinsi Jawa Tengah dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan di kantor BPS provinsi Jawa Tengah dan dinas-dinas pemerintah lainnya yang terkait.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data untuk mengetahui distribusi pendapatan di provinsi Jawa Tengah apakah merata atau tidak, maka pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan koefisien Gini (Hariadi dkk, 2008). Istilah Koefisien Gini mengambil nama dari ahli statistik Italia yang merumuskannya pertama kali pada tahun 1912. Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) sampai satu (ketimpangan sempurna). Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria yang sangat dicari, yaitu prinsip anonimitas, independensia

skala, independensi populasi dan transfer. Rumus koefisien Gini (Widodo, 1990):

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n . (X_{t+1} - X_t)(Y_t + Y_{t+1})$$

Atau

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n . f_i(Y_{t+1} + Y_t)$$

Keterangan:

GC = Angka *Gini Coefficient*

Xi = Proporsi jumlah responden kumulatif dalam kelas i

fi = Proporsi jumlah responden dalam kelas i

Yi = Proporsi jumlah pendapatan responden kumulatif dalam kelas i

Adapun kriteria koefisien Gini adalah dikatakan ketimpangan rendah jika $GC < 0,35$ sementara ketimpangan sedang jika $0,35 < GC < 0,5$ serta ketimpangan tinggi jika $GC > 0,5$.

Guna untuk mengetahui distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson, yaitu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah. Menurut Sjafrizal (2008:107), indeks ketimpangan Williamson adalah analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, dengan menggunakan produk domestik bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Adapun indeks williamson diformulasikan sebagai berikut

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{\bar{Y}}$$

Keterangan:

Yi = PDRB per kapita di kabupaten ke i

$\bar{Y}$ = PDRB rata-rata per kapita di Provinsi

fi = jumlah penduduk kabupaten ke i

n = jumlah penduduk Provinsi

Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dan jumlah penduduk dimana nilai yang diperoleh antara nol dan satu atau ($0 < IW < 1$). Dengan kriteria bahwa apabila angka indeks Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks Williamson semakin jauh dari nol maka akan menunjukkan ketimpangan yang makin lebar.

Adapun secara detail kriteria indeks Williamson adalah sebagai berikut, besarnya IW adalah $0 < IW < 1$

$IW=0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata

$IW=1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna)

$IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata

$IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata

5. Hasil Analisis Data

a. Analisis Distribusi Pendapatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Koefisien Gini)

Guna menganalisis distribusi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah apakah merata atau tidak, dapat dianalisis dengan koefisien Gini (Hariadi dkk, 2008). Kriteria koefisien Gini yaitu dikatakan ketimpangan rendah jika $GC < 0,35$ sementara ketimpangan sedang jika $0,35 < GC < 0,5$ serta ketimpangan tinggi jika $GC > 0,5$. Hasil pengukuran koefisien Gini (lihat lampiran2) diperoleh nilai sebesar 0,252254 yang berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat rendah atau distribusi pendapatan agak merata..

b. Analisis pendapatan antar daerah di provinsi Jawa Tengah (Indeks Williamson)

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang belum dapat dipecahkan khususnya pada negara-negara sedang berkembang. Ketimpangan wilayah ini terjadi dikarenakan perbedaan karakteristik antar daerah, yang menyebabkan satu atau beberapa daerah lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Selain itu

ketimpangan atau kesenjangan antardaerah terjadi karena konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan pembangunan. Guna untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson. Menurut Sjafrizal (2008:107), indeks ketimpangan Williamson adalah analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, dengan menggunakan produk domestik bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar.

Tingkat ketimpangan pada provinsi ini diukur dengan Indeks Williamson. Adapun kriteria indeks Williamson secara detail yaitu besarnya IW adalah $0 < IW < 1$. Jika $IW=0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata, $IW=1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan sempurna), $IW \sim 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata dan $IW \sim 1$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mendekati merata. Adapun secara rincian tingkat ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Tingkat Ketimpangan daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

kabupaten/kota	Indeks Williamson	kabupaten/kota	Indeks Williamson	kabupaten/kota	Indeks Williamson
Kab. Cilacap	0,291	Kab. Karanganyar	0,009	Kab. Batang	0,045
Kab. Banyumas	0,085	Kab. Sragen	0,042	Kab. Pekalongan	0,032
Kab. Purbalingga	0,058	Kab. Grobogan	0,109	Kab. Pemalang	0,080
Kab. Banjarnegara	0,046	Kab. Blora	0,085	Kab. Tegal	0,097
Kab. Kebumen	0,091	Kab. Rembang	0,031	Kab. Brebes	0,047
Kab. Purworejo	0,020	Kab. Pati	0,051	Kota Magelang	0,039
Kab. Wonosobo	0,079	Kab. Kudus	0,408	Kota Surakarta	0,105
Kab. Magelang	0,073	Kab. Jepara	0,043	Kota Salatiga	0,001
Kab. Boyolali	0,032	Kab. Demak	0,088	Kota Semarang	0,348
Kab. Klaten	0,017	Kab. Semarang	0,017	Kota Pekalongan	0,023
Kab. Sukoharjo	0,019	Kab. Temanggung	0,050	Kota Tegal	0,000
Kab. Wonogiri	0,059	Kab. Kendal	0,021		
				Rata-rata	0,076

Sumber : Jawa Tengah dalam angka 2012, diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa secara umum ketimpangan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mendekati merata sebab mendekati nol. Kisaran ketimpangan kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada kisaran 0,000 – 0,408. Ketimpangan sangat merata atau nilai terendah terjadi pada Kota Tegal dan tertinggi terjadi pada Kabupaten Kudus. Namun ada daerah tertentu yang cukup tinggi nilai Indek Williamson-nya, seperti Kabupaten Kudus yang mempunyai nilai IW 0,408, Kota Semarang yang mempunyai nilai IW 0,348, Kabupaten Cilacap yang mempunyai nilai IW 0,291 dan Kota Surakarta yang mempunyai nilai IW 0,105, yang kesemuanya mempunyai PDRB tinggi. Artinya ada kesenjangan yang besar di daerah-daerah tersebut.

6. Pembahasan Hasil Penelitian

Menurut Sjafrizal (2012:107), Ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pembangunan memang merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat. Hasil penelitian diketahui disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah.

Ketimpangan wilayah yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini disebabkan karena perbedaan karakteristik wilayah-wilayah tersebut. Disamping itu terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat ketimpangan di suatu wilayah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Hasil Ketimpangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Koefien Gini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat rendah. Hal ini ternyata konsisten dengan hasil

Indek Williamson yang hasilnya menunjukkan relatif kecil, $IW \sim 0$ atau kesenjangan antar daerah kecil. Indeks ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 sangat bervariasi yang nilai Indek Williamsonnya berkisar antara 0,000 – 0,408. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin banyak pembangunan yang harus dilakukan maka tingkat kemungkinan ketimpangan yang akan terjadi semakin tinggi. Adapun daerah yang mempunyai kesenjangan kecil yaitu Kota Tegal yang mempunyai nilai IW 0,000, Kota Salatiga yang mempunyai nilai IW 0,001 dan Kabupaten Karanganyar yang mempunyai nilai IW 0,009. Menariknya Ketiga daerah tersebut memiliki nilai PDRB di bawah rata-rata nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kabupaten Kudus yang mempunyai nilai IW 0,408, Kota Semarang yang mempunyai nilai IW 0,348, Kabupaten Cilacap yang mempunyai nilai IW 0,291 dan Kota Surakarta yang mempunyai nilai IW 0,105, yang kesemuanya mempunyai PDRB tinggi atau di atas rata-rata nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tinggi rendahnya nilai Indeks Williamson mengandung arti bahwa ketimpangan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita antar daerah atau antar kabupate/kota di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan kabupaten yang ada tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat PDRB per kapita antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mendekati merata. Untuk kabupaten/kota yang Indeks Williamsonnya berada dibawah rata-rata indeks atau lebih rendah (atau mendekati merata) antara lain Kota Tegal (sangat merata), Kota Salatiga(sangat mendekati merata), Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pckalongan, Kota Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Magelang. Sedangkan kabupaten atau kota kabupaten/kota yang Indeks Williamsonnya

berada di atas rata-rata indeks atau lebih tinggi antara lain Kab. Kudus, Kota Semarang, Kab. Cilacap, Kab. Grobogan, Kota Surakarta, Kab. Tegal, Kab. Kebumen, Kab. Demak, Kab. Banyumas, Kab. Blora, Kab. Pemalang, Kab. Wonosobo.

Rendahnya nilai Indeks Williamson antar daerah atau kabupaten bukan berarti secara otomatis menerangkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut (Indeks Williamson lebih rendah) lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. (Indeks Williamson lebih tinggi dari rata-rata provinsi). Indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB per kapita antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang didistribusikan tersebut dengan rata-rata PDRB daerah atau kabupaten/kota lainnya.

Hasil penelitian ini berbeda dari idealnya. Harusnya kabupaten/kota yang nilai produk domestik regional bruto-nya tinggi, mempunyai kesenjangan yang rendah. Kata lainnya semakin tinggi nilai produk domestik regional bruto kabupaten/kota maka semakin rendah kesenjangan kabupaten/kota tersebut.

7. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan:

- a. ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Jawa Tengah berada pada level rendah atau distribusi pendapatan agak merata
- b. Ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah relatif mendekati merata.
- c. Kabupaten atau kota kabupaten/kota yang Indeks Williamsonnya berada di atas rata-rata indeks atau lebih tinggi antara lain Kab. Kudus, Kota Semarang, Kab. Cilacap, Kab. Grobogan, Kota Surakarta, Kab. Tegal, Kab. Kebumen, Kab. Demak, Kab. Banyumas, Kab. Blora, Kab. Pemalang, Kab. Wonosobo
- d. Kabupaten/kota yang Indeks Williamsonnya berada dibawah rata-rata

indeks atau lebih rendah (atau mendekati merata) antara lain Kota Tegal (sangat merata), Kota Salatiga (sangat mendekati merata), Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pckalongan, Kota Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Magelang.

8. Saran

Setelah mengetahui hasil penelitian, bahwa proses atau cara pendistribusian menjadi kunci utama merata tidaknya distribusi pendapatan maka saran untuk masa yang akan datang adalah:

- a. Pemerintah harus mengubah distribusi fungsional (merancang kebijakan yang ditujukan untuk merubah harga faktor produksi guna mengoreksi distorsi dan pemeratakan pembangunan
- b. Meratakan distribusi ukuran yang didasarkan pada kepemilikan dan penguasaan atas asset produktif dan ketrampilan sumberdaya manusia.
- c. Meratakan (meningkatkan) distribusi ukuran golongan penduduk berpenghasilan rendah. Meratakan (mengurangi) distribusi ukuran golongan penduduk berpenghasilanh melalui pengeluaran publik yang dananya bersumber dari pajak untuk meningkatkan pendapatan kaum miskin secara langsung maupun tidak langsung.

9. Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta:BPFE
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten 2012*. Klaten:BPS
- Hariadi, dkk. 2008. Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan kajian ekonomi negara berkembang*. hal 61 – 70

- Rusvitiadi, Ernan. dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang Sumatera Barat, Baduose Media.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiarto. 2006. *Metode Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widodo, S.T. 1990. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius